

DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL DAERAH TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DAN MAKRO EKONOMI PERTANIAN

Azhar Bafadal

azharbafadal@yahoo.com

M. Arief Dirgantoro

Surni

Universitas Halu Oleo, Kendari

ABSTRACT

The purpose of the study was to evaluate the impact of regional fiscal on economic performance and macroeconomic agriculture performance in Southeast Sulawesi (Sultra). The model used was the econometric model, i.e. by constructing and estimating a system of simultaneous equations consisting of 42 equations. Next, the simulation was done in order to bring out the feasible policy scenarios. The data used were time series from 1990 to 2011. The analysis showed that in order to increase the local fiscal revenue from taxes and retributions then the development orientation was geared towards output increasing, and in sequence the increased revenue would be able to boost the disbursement of the General Allocation Fund (DAU) of the central government. If this can be achieved then it will also be able to increase the fiscal revenue from non-tax revenue. An output-oriented policy on the one hand and efforts to control population growth on the other hand is a necessary step to be taken in order to increase the per capita income. The increase in per capita income will affect the decline in unemployment and poverty. The increase in per capita income will make greater influence in reducing the rate of poverty than the unemployment.

Keywords: fiscal policy, local revenue, unemployment, poverty

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah melakukan evaluasi dampak kebijakan fiskal daerah terhadap kinerja perekonomian dan kinerja makro ekonomi pertanian. Model yang digunakan adalah model ekonometrika, yaitu dengan membangun dan mengestimasi sistem persamaan simultan yang terdiri atas 42 persamaan. Selanjutnya dilakukan simulasi untuk memunculkan skenario kebijakan. Data yang digunakan adalah *time series* tahun 1990-2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa agar dapat meningkatkan penerimaan fiskal daerah dari pajak dan retribusi maka orientasi pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan output, dan secara berantai maka peningkatan penerimaan tersebut dapat mendongkrak kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Jika upaya ini dapat dicapai maka juga akan mampu meningkatkan penerimaan fiskal dari bagi hasil bukan pajak. Kebijakan berorientasi output pada satu sisi dan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk pada sisi lain merupakan langkah yang perlu diambil agar pendapatan per kapita dapat meningkat. Peningkatan pendapatan per kapita ini akan berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan pendapatan per kapita akan lebih besar pengaruhnya di dalam menurunkan angka kemiskinan dibandingkan angka pengangguran.

Kata kunci: kebijakan fiskal, pendapatan asli daerah, pengangguran, kemiskinan

PENDAHULUAN

Implementasi perimbangan keuangan pusat-daerah (desentralisasi fiskal) yang menyertai pelaksanaan otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah Kota dan

Kabupaten pada posisi yang sulit karena Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan keuangan, sumberdaya manusia (SDM), dan lingkungan usaha yang semakin dinamis sebagai akibat gelombang

globalisasi ekonomi. Salah satu kunci utama penentu keberhasilan Pemda terhadap desentralisasi fiskal merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah. Dua hal penting tersebut adalah: (1) apakah Pemda memusatkan perhatiannya untuk memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah guna meningkatkan kemandirian keuangannya, dan (2) pemerintah mementingkan peningkatan efektifitas pengeluarannya (*expenditure policy*) untuk mengembangkan iklim usaha yang lebih baik bagi daerahnya (Pakasi, 2004).

Kebijakan desentralisasi fiskal telah memberi keleluasaan daerah untuk menentukan prioritas pembiayaan pembangunan dan peluang peningkatan jumlah dana pembangunan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan peningkatan penerimaan daerah, keleluasaan pemerintah daerah untuk membelanjakan dana alokasi yang diterima dan kewenangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan mampu membuka peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, selanjutnya diharapkan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang nomor 33 tahun 2004 diuraikan sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu terdiri (1) PAD yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain penerimaan yang sah, (2) dana perimbangan yang meliputi bagian daerah dari penerimaan pajak, bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, (3) pinjaman daerah, dan (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan dan semakin membaik yang ditunjukkan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atas harga konstan yang selalu tumbuh positif. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai faktor produksi yang menghasilkan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Tenggara telah kembali memproduksi secara normal, namun demikian, walau kesejahteraan penduduk cenderung meningkat tetapi dibandingkan dengan nasional masih tertinggal jauh. Berdasarkan data BPS Sultra, PDRB per kapita Sultra tahun 2009 sebesar Rp12,11 juta, di mana masih tertinggal jauh dibandingkan keadaan nasional pada angka Rp24,26 juta.

Kondisi diatas menjadi perhatian besar pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, amun dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah menghadapi permasalahan antara lain: (1) PAD rendah serta pengeluaran daerah belum efektif, (2) jumlah penduduk miskin cukup banyak, (3) belum berkembangnya sistem dan jaringan lembaga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan rendahnya semangat wira-usaha, (4) kurang tersedianya lapangan kerja yang cukup dan lemahnya kreatifitas tenaga kerja dalam berusaha.

Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi harus segera dilakukan mengingat kondisi daerah seperti kondisi penduduk menggambarkan bahwa dari usia produktif sebesar 65,1 persen, jumlah kesempatan kerja mengalami penurunan, dan menyebabkan penduduk miskin masih bertahan pada angka di atas 400.000 jiwa. Kalau pada tahun 2006, penduduk miskin sebanyak 466.700 orang atau 23,37% dari jumlah penduduk, maka pada tahun 2007 tidak mengalami perubahan yang berarti yaitu pada angka 465.400 orang (21,33%). Pada saat ini penduduk miskin walau telah mengalami penurunan yaitu sebanyak 350.700 jiwa, tetapi persentasenya masih cukup tinggi yaitu mencapai 16% dari jumlah penduduk Sultra. Perekonomian Sultra banyak ditopang oleh sektor pertanian mengingat sekitar 33% nilai produk

domestik regional bruto disumbangkan oleh sektor pertanian. Selain itu, separuh dari penduduk Sultra bekerja pada sektor pertanian yang berada di pedesaan. Oleh karena itu, kemiskinan dan pengangguran merupakan fenomena makroekonomi pertanian yang memerlukan upaya secara sistematis untuk mengatasinya melalui kebijakan pemerintah diantaranya melalui kebijakan fiskal yang terarah.

Disisi penerimaan daerah terlihat bahwa sumber penerimaan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar dari subsidi pemerintah pusat melalui komponen Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan kontribusi PAD masih relatif rendah yaitu pada kisaran 20% dari total anggaran daerah Sultra. Dengan demikian, PAD masih relatif kecil kontribusinya terhadap anggaran dibandingkan dengan DAU. Hal ini disebabkan karena terbatasnya potensi sumberdaya yang ada dan pengelolaan sumberdaya alam yang belum efektif. Penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan fiskal sebagai konsekuensi otonomi daerah selanjutnya akan dianalisis dampak kebijakan fiskal terhadap kinerja perekonomian di daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pemerintah daerah meningkatkan penerimaan daerah dan mengalokasikan anggaran? Langkah apa yang harus dilakukan agar output, pendapatan, dan kesempatan kerja meningkat? Sejauh mana kebijakan fiskal mampu meningkatkan kinerja perekonomian daerah sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan perkapita, kesempatan kerja, dan mengurangi jumlah pengangguran dan penduduk miskin?

Tujuan penelitian pertama adalah mengevaluasi dampak kebijakan fiskal terhadap kinerja perekonomian daerah yang meliputi pendapatan, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dan terhadap kinerja makroekonomi pertanian yaitu pengangguran dan kemiskinan, kedua adalah merumuskan

alternatif skenario kebijakan yang berperan meningkatkan kinerja perekonomian daerah dan kinerja makroekonomi pertanian.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dalam mencermati kebijakan yang terkait dengan pengalokasian anggaran guna membuat suatu kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja perekonomian daerah dan secara beriringan memberikan efek yang baik terhadap kinerja makroekonomi pertanian utamanya dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Selanjutnya, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan berarti bagi pemerintah daerah guna mengambil kebijakan fiskal daerah yang berdasar pada hasil penelitian (*research based*). Dengan demikian, kalangan perguruan tinggi dapat memberikan sinergi berarti dengan pemerintah daerah dalam level perumusan kebijakan yang berarti bagi pembangunan makroekonomi daerah.

TINJAUAN TEORETIS

Landasan Teori dan Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berangkat dari teori ekonomi makro dan aplikasinya yang terkait dengan kebijakan fiskal dan desentralisasi. Kebijakan fiskal diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Apabila pemerintah melakukan ekspansi fiskal maka permintaan barang dan jasa secara agregat akan meningkat, selanjutnya akan meningkatkan output dan harga. Instrumen kebijakan fiskal adalah pajak, pengeluaran pemerintah (G), dan pembayaran transfer. Sejak tahun 2000, kewenangan fiskal daerah mengalami perubahan yang cukup berarti sehingga Pemerintah Daerah lebih leluasa dalam mengelola fiskalnya yang dikenal dengan nama desentralisasi fiskal.

Secara umum, desentralisasi diartikan sebagai suatu penyerahan (difusi) pen-delegasian kekuasaan dan wewenang, serta

pendelegasian tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan. Desentralisasi dapat pula dimaknai sebagai penyerahan kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat ke pemerintah bawahan.

Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat sebagai sumber utama dana pembangunan. Secara umum desentralisasi berfungsi (1) mengurangi peran dan tanggung jawab diantara pemerintah pada semua tingkat; (2) memperhitungkan bantuan dan transfer antar pemerintah; (3) memperkuat sistem penerimaan daerah/ lokal; (4) memprivatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan (5) menyediakan suatu jaring pengaman bagi fungsi redistribusi.

Desentralisasi fiskal dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dapat pula mendorong pertumbuhan melalui efisiensi alokasi sumberdaya pada level daerah. Maksudnya jika investasi infrastruktur lebih banyak atau alokasi sumberdaya lebih efisien untuk sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi, maka desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sumber-sumber penerimaan fiskal daerah terdiri atas: PAD, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, transfer dari pemerintah pusat dan penerimaan lain yang sah berdasarkan undang-undang. Adapun yang termasuk dalam pendapatan asli daerah adalah pajak-pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari badan usaha milik daerah dan jenis pendapatan lainnya yang sah. Secara teoritis, besaran pajak merupakan fungsi dari *disposable income*. Selain pajak daerah dan retribusi daerah, sumber penerimaan daerah lainnya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bagi hasil sumberdaya alam (BHSDA). Disisi pengeluaran, struktur pengeluaran daerah dikelompokkan kedalam pengeluaran untuk belanja

aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Belanja aparatur merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang bersifat administrasi dan pelayanan pemerintah umum. Belanja pelayanan publik merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan pembangunan.

Dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kinerja makroekonomi dikemukakan oleh Yudhoyono (2004), yaitu (1) pengeluaran pemerintah memiliki peranan penting untuk menstimulasi permintaan agregat dan output; dan (2) injeksi dari pemerintah berupa dana pembangunan untuk sektor pertanian berperan untuk menstimulasi pertumbuhan output pertanian dan menciptakan kesempatan kerja. Dalam UU Otonomi daerah 2004, disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah adalah: (1) PAD yang terdiri dari pajak, retribusi dan PAD lain yang sah; (2) bantuan pemerintah pusat berupa transfer pemerintah pusat DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan (3) bagi hasil yang berupa pajak dan non pajak misalnya pajak bumi dan bangunan, bagi hasil sumberdaya alam.

Sumber-sumber penerimaan fiskal daerah terdiri atas PAD, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, transfer dari pemerintah pusat dan penerimaan lain yang sah berdasarkan undang-undang. Adapun yang termasuk dalam pendapatan asli daerah adalah pajak-pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari badan usaha milik daerah dan jenis pendapatan lainnya yang sah. Selain pajak daerah dan retribusi daerah, sumber penerimaan daerah lainnya adalah PBB, BPHTB dan BHSDA. Disisi pengeluaran, struktur pengeluaran daerah dikelompokkan kedalam pengeluaran untuk belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Belanja aparatur merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang bersifat administrasi dan pelayanan pemerintah umum. Belanja pelayanan publik merupa-

kan pengeluaran untuk membiayai kegiatan pembangunan.

Sinaga dan Siregar (2003) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran fiskal daerah melalui pendekatan model ekonometrika dengan menggunakan persamaan simultan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap sisi penerimaan dan pengeluaran fiskal daerah. Pada sisi penerimaan terjadi peningkatan yang tinggi khususnya dari dana perimbangan dan PAD, dimana peranan dana perimbangan semakin tinggi sedangkan PAD semakin turun. Produk domestik regional bruto merupakan faktor dominan yang mempengaruhi penerimaan daerah (pajak, retribusi, bagi hasil dan transfer), sedangkan dana perimbangan merupakan faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran rutin dan pembangunan.

Kajian tentang pengaruh PDRB, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh dilakukan oleh Iskandar (2010). Metode penelitian ini adalah sensus dengan menggunakan data gabungan yaitu data *time series* dari tahun 2005 sampai dengan 2009 dan data *cross section* yang terdiri atas 23 kabupaten/kota (*pooled data*). Model yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Selain itu, jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara umum penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Sebayang (2008) melakukan studi dengan menggunakan data fiskal daerah dari seluruh provinsi di Indonesia berupa data panel. Kapasitas fiskal diukur dengan

membandingkan pendapatan asli daerah dengan pengeluaran rutin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berarti ketika kapasitas fiskal meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Perbedaan kapasitas fiskal masing-masing daerah juga akan mempengaruhi pengalokasian atau skala prioritas juga akan bervariasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Rahayu (2005) dengan judul Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri dimana pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB mempengaruhi perubahan PAD. Pengaruh perubahan terbesar adalah peningkatan jumlah penduduk, bukan pengeluaran pembangunan yang didalamnya terdapat sektor pertanian. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa faktor-faktor mempengaruhi persentase perubahan PAD adalah total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB, hal ini didukung dengan tingkat koefisiensi determinasi (R^2) sebesar 0,971.

Penelitian yang dilakukan Sasana (2009) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap serapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selain itu, tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap

kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kajian tentang fiskal lainnya berupa evaluasi kebijakan fiskal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Haderi, *et al.* (2010)

Sriyana (2009) melakukan studi analisis kapasitas fiskal daerah dengan studi kasus di Kabupaten Gunung Kidul. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang relatif kecil dalam mendukung penerimaan daerah, sedangkan proporsi terbesar adalah dana perimbangan yang merupakan kucuran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal di Kabupaten Gunung Kidul masih sangat rendah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba Perusahaan daerah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah bersumber dari beberapa objek yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan tambang golongan C, dan pajak parkir kendaraan bermotor, serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah.

Sudjai (2011) melakukan studi dampak kebijakan fiskal dalam upaya stabilitas harga komoditas pertanian. Studi tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga komoditas pertanian berdampak signifikan terhadap inflasi dan menciptakan instabilitas harga dan pasokan pangan. Pemerintah telah menggunakan berbagai instrumen kebijakan fiskal dalam upaya stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan. Kebijakan fiskal pemerintah telah membuahkan hasil terbukti dengan terus turunnya inflasi di triwulan I tahun 2011 hingga mencapai 6.16 persen *year on year* pada bulan April 2011. Kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan dan bea hanya berlaku sementara dan dibarengi dengan upaya peningkatan produktifitas produksi pertanian.

Yudhaningsih (2010) melakukan studi dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian regional di Indonesia. Studi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia yaitu tingkat pertumbuhan masa sekarang sangat tergantung pada tingkat pertumbuhan atau sejarah pembangunan masa sebelumnya. Nilai kecepatan penyesuaian yang hanya sebesar 0.77 menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan kecilnya dampak yang ditimbulkan dalam jangka pendek pada saat dilakukan intervensi suatu kebijakan sehingga pertumbuhan regional di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kemiskinan menengah.

Penelitian Abustan dan Mahyudin (2009) dengan menggunakan analisis *vector auto regressive* (VAR) mengkaji korelasi antara belanja publik dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 1985-2005. Hasil pengujian *unit root* menunjukkan bahwa variabel PDRB dan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) Sulawesi Selatan pada data level tidak *stationer* atau mengandung *unit root*. Variabel PDRB menjadi *stationer* pada data *seconddifferent*, sedangkan variabel APBD *stationer* pada data *firstdifferent*. Hubungan kausalitas antara PDRB dan APBD hanya satu arah yakni PDRB sebagai determinan terhadap APBD dan tidak sebaliknya. Berarti bahwa kinerja belanja publik tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Hadi (2003) melakukan penelitian dengan menggunakan analisis *vector auto regression* (VAR) untuk mengetahui korelasi antara pendapatan nasional dan investasi pemerintah di Indonesia dalam kurun waktu 1983/1984–1999/2000. Penelitian ini dilakukan untuk mencari hubungan timbal balik (*interrelationship*) antara pengeluaran pembangunan rupiah yang mewakili investasi pemerintah dengan PDB yang mewakili pendapatan nasional. Dalam periode yang diamati, investasi pemerintah di sektor fiskal, khususnya pengeluaran pembangunan rupiah ternyata tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagaimana menurut aliran Klasik terdapat dikotomi antara sektor riil dan sektor moneter, dalam studi ini juga ditemukan antara dikotomi antara sektor riil dan sektor fiskal di Indonesia.

Setiyawati dan Hamzah (2007) meneliti pengaruh PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan terhadap kemiskinan dan pengangguran dengan menggunakan pendekatan analisis jalur. Sampel penelitian ini adalah 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan data realisasi dari laporan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2005. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran adalah signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran. Hasil pengujian secara tidak langsung menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap kemiskinan adalah sebesar 9.66% dan terhadap pengangguran sebesar 16.69, sedangkan pengaruh DAU terhadap kemiskinan adalah 4.9% dan terhadap pengangguran sebesar 8.6%. Kajian sejenis yang memperlihatkan kaitan antara kebijakan fiskal dan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi juga dilakukan oleh Tamai (2009) dan Musa, *et al.* (2013). Beberapa hasil penelitian mengenai kebijakan fiskal kaitannya dengan kinerja pada sektor perekonomian lainnya telah dilakukan juga oleh Eze and Ogiji (2013), Akanni and Osinowo (2013).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi pembangunan ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk mengindikasikan penambahan pendapatan setiap tahunnya yang tercermin dari peningkatan output agregat atau barang dan jasa, serta PDRB di daerah.

Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas dari faktor-faktor produksi seperti sumberdaya manusia, kapital dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari pertumbuhan pada sisi permintaan agregat dan penawaran agregat. Keseimbangan permintaan dan penawaran agregat merupakan keseimbangan ekonomi yang menghasilkan sejumlah output agregat dan tingkat harga tertentu yang selanjutnya akan merupakan pendapatan nasional atau pendapatan daerah.

Data PDB atau PDRB digunakan oleh para ekonom untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah adalah pada perpindahan faktor atau *factor movements*. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung berdasarkan nilai absolut ataupun nilai relatif dalam persentase.

Penyerapan tenaga kerja atau kesempatan kerja atau permintaan tenaga kerja diartikan sebagai banyaknya orang yang bekerja pada berbagai sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, pertambangan, industri, kehutanan, jasa dan sektor-sektor lain. Kurva tenaga kerja menunjukkan kecondongan garis yang menurun, ini dapat diartikan bahwa suatu perusahaan yang menghendaki keuntungan maksimal dapat memilih jumlah tenaga kerja yang optimal untuk digunakan. Jumlah optimal ini menjadikan nilai produk fisik marjinal tenaga kerja (MP_L) sama dengan upah yang merupakan biaya marjinal bagi satu unit tenaga kerja.

Kajian mengenai pertumbuhan, kesenjangan pendapatan, dan kemiskinan yang dikutip dari Yudhoyono (2004) menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara tingkat kemiskinan dengan pendapatan rata-rata atau dalam konteks penelitian ini adalah PDRB perkapita. Makin tinggi PDRB, maka kemiskinan makin rendah, sedangkan proporsi penduduk miskin akan meningkat

seiring dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan. Kajian Ningsih dan Prih (2012) memperlihatkan dampak bantuan program penanggulangan kemiskinan terhadap kehidupan masyarakat miskin di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Beberapa bantuan program penanggulangan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah, seperti Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai, Beras Miskin, Jamkeskin, dan beberapa program-program lain. Dampak positif dari pemberian bantuan tersebut yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup warga miskin berupa sandang, pangan, dan kesehatan. Mereka dapat membayar iuran sekolah anaknya, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan dapat mengembangkan usaha dari dana bantuan yang diperoleh dari pemerintah, sedangkan dampak negatif bagi masyarakat yang memperoleh bantuan dari pemerintah adalah adanya penurunan semangat dalam bekerja karena sebagian dari masyarakat terlalu menggantungkan diri pada pemerintah.

Sudaryanto dan Rusastra (2006) melakukan studi kebijakan strategis usaha pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan pertanian dengan program daya rendah, kemampuan sumberdaya manusia dan adopsi teknologi rendah. Lahan pertanian abadi dapat diwujudkan jika sektor pertanian (dengan nilai multi-fungsinya) dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan. Setelah krisis ekonomi, kemiskinan relatif tahun 2004 menurun drastis menjadi 16,70%, tetapi secara absolut angkanya tetap tinggi, yaitu 36,10 juta orang. Sebagian besar dari mereka (68,70%) tinggal di pedesaan dengan kegiatan utama (60%) di sektor pertanian, dengan ciri utama infrastruktur wilayah marginal, penguasaan dan akses sumber daya rendah, serta kemampuan sumber daya manusia dan adopsi teknologi rendah.

Studi pengembangan produksi kerajinan sebagai upaya mendukung program pengentasan kemiskinan dilakukan oleh Maisaroh (2008). Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa usaha ini telah lama menjadi mata pencaharian pokok utama di desa selain bertani, karena bagi mereka sudah tidak mempunyai alternatif pekerjaan yang lebih baik lainnya serta sesuai dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang mereka miliki. Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap peningkatan produksi industri kecil kerajinan (IKK) adalah faktor tenaga kerja, tingkat keahlian (*skill*), modal usaha, manajemen usaha dan faktor pemasaran. Faktor yang paling dominan pertama terhadap peningkatan produksi kerajinan adalah faktor tingkat keahlian atau *skill* dan pemasaran. Faktor modal usaha dalam IKK ini sekalipun bukan sebagai faktor dominan yang pertama, tetapi faktor modal merupakan faktor dominan yang utama untuk dapat mempengaruhi perkembangan tingkat produksi kerajinan selain faktor keahlian (*skill*) dan faktor pemasaran.

Rerangka Konseptual dan Hipotesis

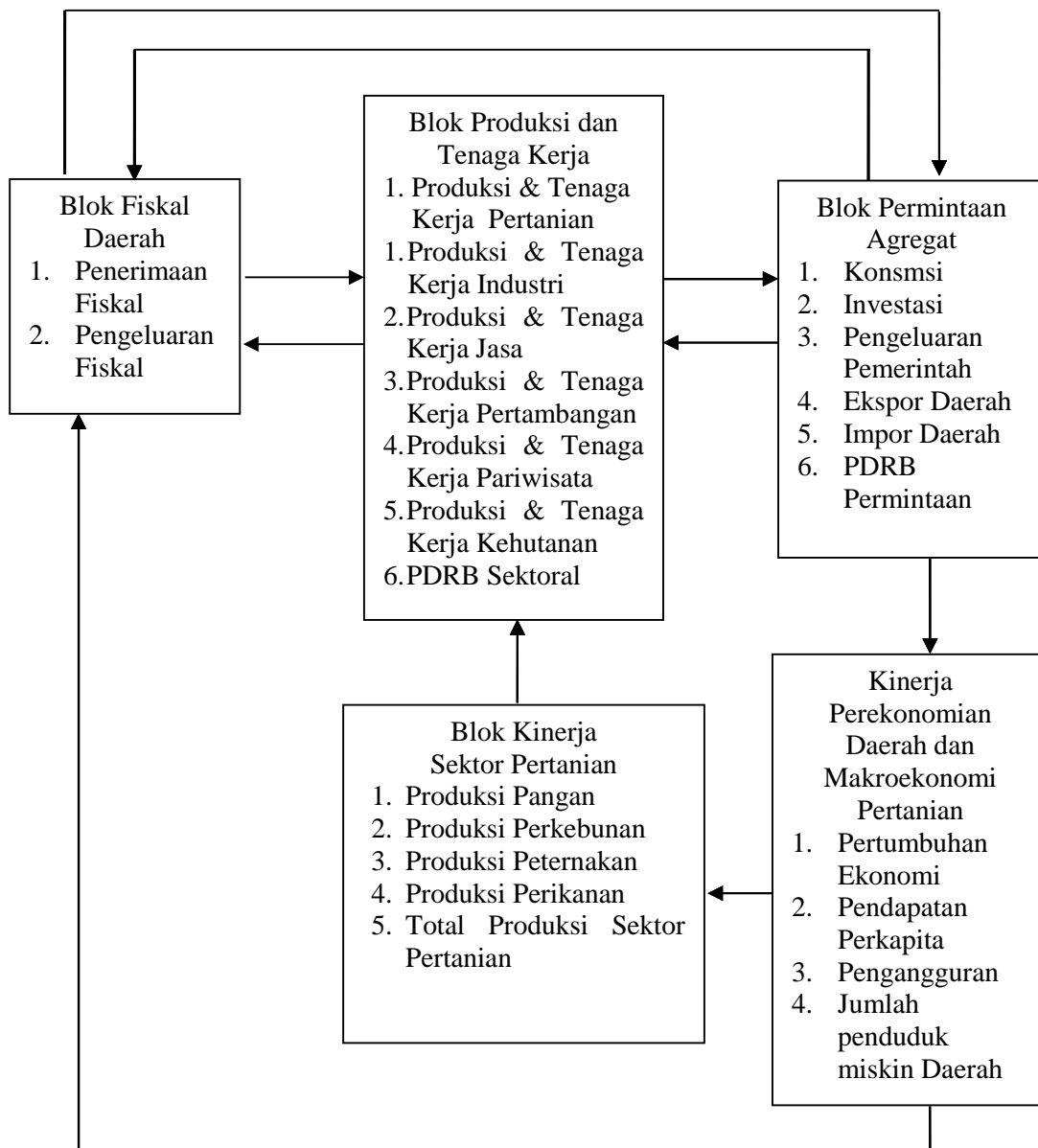
Rerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1. Untuk dapat menangkap fenomena fiskal dan keterkaitannya dengan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara maka secara teoretis disusun dalam sistem persamaan simultan dan dinamis dengan mengintegrasikan sisi penawaran dan permintaan agregat.

Fiskal Daerah

Variabel endogen pada blok fiskal daerah mencakup variabel yang dapat mewakili kondisi fiskal daerah yaitu penerimaan dan pengeluaran daerah. Penerimaan fiskal daerah berasal dari dua sumber yaitu yang diperoleh dari sumber pendapatan daerah sendiri dan penerimaan yang merupakan transfer dari pusat. Oleh karena itu, variabel yang masuk dalam penerimaan fiskal daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, dana

alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Pengeluaran fiskal daerah mencakup pengeluaran rutin dan pengeluaran sektoral. Pengeluaran sektoral diwakili oleh sektor pertanian dan sektor industri. Oleh karena itu, variabel yang masuk dalam pengeluaran daerah adalah pengeluaran rutin daerah,

pengeluaran pembangunan sektor pertanian dan pengeluaran pembangunan sektor industri. Berdasarkan uraian di atas dan hasil studi terdahulu maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: H₁: semua variabel penjelas (*expalantory variables*) pada blok fiskal daerah berkorelasi positif terhadap variabel endogennya.



Gambar 1
Rerangka Konseptual Penelitian

Produksi dan Tenaga Kerja

Variabel endogen pada blok produksi dan tenaga kerja adalah variabel yang dapat menggambarkan kinerja sektoral perekonomian, yaitu kinerja produksi dan kinerja tenaga kerja. Sektor perekonomian yang masuk ke dalam blok produksi adalah variabel produksi sektor industri, produksi sektor pertambangan, produksi sektor pariwisata, produksi sektor jasa dan produksi sektor kehutanan, sedangkan pada blok tenaga kerja meliputi variabel tenaga kerja sektor pertanian, tenaga kerja sektor pertambangan, tenaga kerja sektor industri, tenaga kerja sektor pariwisata dan tenaga kerja sektor jasa, maka hipotesis kedua yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

H₂: Semua variabel penjelas pada blok produksi dan tenaga kerja berkorelasi positif terhadap variabel endogennya, kecuali tingkat suku bunga memiliki korelasi negatif terhadap produksi sektor industri.

Permintaan Agregat

Pada blok permintaan agregat, variabel endogen yang masuk ke dalam model adalah variabel yang merupakan komponen dari permintaan agregat, dimana permintaan agregat tersebut besarnya diperoleh dari produk domestik regional bruto. Oleh karena itu, variabel endogen pada blok permintaan agregat meliputi konsumsi, investasi, ekspor daerah dan impor daerah, maka hipotesis ketiga adalah:

H₃: Semua variabel penjelas pada blok permintaan agregat berkorelasi positif terhadap variabel endogennya, kecuali konsumsi pangan terhadap non pangan, tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap total investasi, dan total investasi terhadap impor daerah memiliki korelasi negatif.

Kinerja Perekonomian Daerah dan Makroekonomi Pertanian

Variabel endogen pada blok kinerja perekonomian daerah menggambarkan kinerja makroekonomi pembangunan yang

dikaji sesuai dengan topik penelitian. Variabel endogen yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, penduduk miskin daerah dan pengangguran daerah. Kedua variabel terakhir ini merupakan variabel yang diharapkan dapat menggambarkan seberapa besar kebijakan fiskal dapat mengatasi permasalahan makroekonomi pertanian, maka hipotesis keempat adalah:

H₄: Semua variabel penjelas pada blok kinerja perekonomian daerah dan makroekonomi pertanian berkorelasi negatif terhadap variabel endogennya, kecuali pengangguran daerah terhadap penduduk miskin berkorelasi positif.

Kinerja Sektor Pertanian

Pada blok kinerja sektor pertanian menggambarkan kinerja sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pada model yang dibangun, blok sektor pertanian dibuat tersendiri dengan pertimbangan bahwa perekonomian Sulawesi Tenggara sebagian besar atau sekitar 33% disumbangkan oleh sektor pertanian. Oleh karena itu pada blok kinerja sektor pertanian, variabel endogennya meliputi produksi tanaman pangan, produksi perkebunan, produksi peternakan dan produksi perikanan, maka hipotesis kelima adalah:

H₅: Semua variabel penjelas pada blok kinerja sektor pertanian berkorelasi positif terhadap variabel endogennya.

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa model persamaan simultan. Model persamaan simultan tersebut menggambarkan hubungan masing-masing variabel penjelas (*explanatory variables*) dan variabel endogen (*endogenous variables*) khususnya yang menyangkut tanda (*sign*) dan besaran (*magnitude*) dari penduga parameter sesuai dengan harapan teoritis (Manurung, *et al.*, 2005). Konstruksi model dalam bentuk persamaan simultan dengan

alasan bahwa jumlah persamaan cukup banyak dan terdapat keterkaitan antar persamaan dalam model. Dengan model persamaan simultan ini maka tanda (+ atau -) pada setiap koefisien regresi persamaan untuk masing-masing blok sekaligus menunjukkan hipotesa penelitian.

Model yang dibangun dikelompokkan dalam lima blok yaitu: (1) blok fiskal daerah, (2) blok produksi dan tenaga kerja, (3)

blok permintaan agregat, dan (4) blok kinerja perekonomian daerah dan makroekonomi pertanian (5) blok kinerja sektor pertanian. Berdasarkan keterkaitan blok-blok di atas, maka rerangka model kebijakan fiskal secara rinci dijelaskan dalam model ekonometrika dengan 42 persamaan, terdiri atas 29 persamaan struktural dan 13 persamaan identitas.

**Spesifikasi Model
Blok Fiskal Daerah**

Penerimaan Daerah
Pajak Daerah

$$TXD = a_0 + a_1PDRBD + a_2D + a_3TREND + a_4LTXD + \mu_1 \dots\dots\dots (1)$$

(+) (+) (+) (+)

Retribusi Daerah

$$RETD = b_0 + b_1PDRBS + b_4LRETD + \mu_2 \dots\dots\dots (2)$$

(+) (+)

Pendapatan Asli Daerah

$$PAD = TXD + RETD \dots\dots\dots (3)$$

Dana Alokasi Umum

$$DAU = c_0 + c_1TPD + c_2D + c_3TREND + c_4LDAU + \mu_3 \dots\dots\dots (4)$$

(+) (+) (+) (+)

Dana Alokasi Khusus

$$DAK = d_0 + d_1PDRBK + d_2D + d_3TREND + d_4LDAK + \mu_4 \dots\dots\dots (5)$$

(-) (+) (+) (+)

Bagi Hasil Pajak

$$BHNTX = e_0 + e_1TTKD + e_2PDRBD + e_3D + e_4TREND + e_5LBHTX + \mu_5 \dots\dots\dots (6)$$

(+) (+) (+) (+) (+)

Bagi Hasil Bukan Pajak

$$BHNTX = f_0 + f_1PDRBD + f_2D + f_3TREND + f_4LBHNTX + \mu_6 \dots\dots\dots (7)$$

(+) (+) (+) (+)

Total Bagi Hasil

$$TBHS = BHNTX + BHNTX \dots\dots\dots (8)$$

Total Transfer Pusat ke Daerah

$$TRNF = DAU + DAK + TBHS \dots\dots\dots (9)$$

Total Penerimaan Daerah

$$TPD = PAD + TRNF \dots\dots\dots (10)$$

Pengeluaran Daerah

Pengeluaran Rutin Daerah

$$GRTN = g_0 + g_1TPD + g_2D + g_3TREND + g_4LGRTN + \mu_7 \dots\dots\dots (11)$$

(+) (+) (+) (+)

Pengeluaran Pembangunan Sektor Pertanian

$$GPSP = h_0 + h_1TKSP + h_2D + h_3TREND + h_4LGPSP + \mu_8 \dots\dots\dots (12)$$

(+) (+) (+) (+)

Pengeluaran Pembangunan Sektor Industri

$$GIND = i_0 + i_1TPD + i_2D + i_3TREND + i_4LGIND + \mu_9 \dots\dots\dots (13)$$

(+) (+) (+) (+)

Keterangan:

- BHTX = Bagi hasil pajak (Rp/th)
- BHNTX = Bagi hasil bukan pajak (Rp/th)
- DAU = Dana Alokasi umum (Rp/th)
- DAK = Dana alokasi khusus (Rp/th)
- D = Dummy desentralisasi fiskal
Sebelum desentralisasi fiskal = 0; setelah desentralisasi fiskal = 1
- GRTN = Pengeluaran rutin daerah (Rp/th)
- GPSP = Pengeluaran pembangunan sektor pertanian (Rp/th)
- GIND = Pengeluaran pembangunan sektor industri (Rp/th)
- INVE = Total investasi daerah (Rp/th)
- LTXD = Pajak Daerah tahun sebelumnya (Rp/th)
- LRETD = Penerimaan Retribusi daerah tahun sebelumnya (Rp/th)
- LDAU = Dana alokasi umum tahun sebelumnya (Rp/th)
- LBHTX = Bagi hasil bukan pajak (Rp/th)
- LBHNTX = Bagi hasil bukan pajak tahun sebelumnya (Rp/th)
- LGRTN = Pengeluaran rutin daerah tahun sebelumnya (Rp/th)
- LGPSP = Pengeluaran pembangunan sektor pertanian tahun sebelumnya (Rp/th)
- PAD = Penerimaan Pendapatan asli daerah (Rp/th)
- POPP = Polulasi penduduk (Orang/th)
- PDRBS = Produk domestik regional bruto sektoral
- RETD = Penerimaan Retribusi daerah (Rp/th)
- TPD = Total Penerimaan Daerah (Rp/th)
- TGD = Total Pengeluaran Pemerintah (Rp/th)
- TXD = Pajak Daerah (Rp/th)
- TTKD = Penyerapan tenaga kerja daerah (orang/tahun) = total tenaga kerja daerah
- TREND = Trend (th ke 1, 2, ..., n)
- TBHS = Total bagi hasil (Rp/th)
- TRNF = Total transfer pemerintah (Rp/th)
- TQSP = Total produksi sektor pertanian (Rp/th)
- TQIN = Total produksi sektor industri (Rp/th)

Blok Produksi dan Tenaga Kerja Daerah

Blok Produksi

Produksi Sektor Industri

$$TQIN = j_0 + j_1TKIN + j_2IR + j_3D + j_4TREND + j_5LTQIN + \mu_{10} \dots\dots\dots (14)$$

(+) (-) (+) (+) (+)

Produksi Sektor Pertambangan

$$TQTBG = k_0 + k_1TKTBG + k_2INVE + k_3D + k_4TREND + k_5LTQTBG + \mu_{10} \dots\dots\dots (15)$$

(+) (+) (+) (+) (+)

Produksi Sektor Pariwisata

$$TQWS = l_0 + l_1PDRBD + l_2D + l_3TREND + l_4LTQWS + \mu_{11} \dots\dots\dots (16)$$

(+) (+) (+) (+)

Produksi Sektor Jasa

$$TQJS = m_0 + m_1PDRBD + m_2TKJS + m_3D + m_4TREND + \mu_{12} \dots\dots\dots (17)$$

(+) (+) (+) (+)

Produksi Sektor Kehutanan
 $TQHT = n_0 + n_1PDRBD + n_2D + n_3TREND + n_4LTQHT + \mu_{13}$ (18)
 (+) (+) (+) (+)

Produk Domestik Regional Bruto Sektoral
 $PDRBS = TQSP+TQIN+TQTBG+TQWS+TQJS+TQHT$ (19)

Blok Tenaga Kerja

Tenaga Kerja Sektor Pertanian
 $TKSP = o_0 + o_1PDRBD + o_2D + o_3TREND + o_4LTKSP + \mu_{14}$ (20)
 (+) (+) (+) (+)

Tenaga Kerja Sektor Pertambangan
 $TKTBG = p_0 + p_1PDRBD + p_2TQTBG + p_3D + p_4LTKTBG + \mu_{15}$ (21)
 (+) (+) (+) (+)

Tenaga Kerja Sektor Industri
 $TKIN = q_0 + q_1PDRBD + q_2INVE + q_3D + q_4TREND + \mu_{16}$ (22)
 (+) (+) (+) (+)

Tenaga Kerja Sektor Pariwisata
 $TKWS = r_0 + r_1TQWS + r_2D + r_3TREND + r_4LTKWS + \mu_{17}$ (23)
 (+) (+) (+) (+)

Tenaga Kerja Sektor Jasa
 $TKJS = s_0 + s_1TQJS + s_2D + \mu_{18}$ (24)
 (+) (+)

Total Tenaga Kerja Daerah
 $TTKD = TKSP+TKTBG+TKIN+TKWS+TKJS$ (25)

Keterangan:

- IR = Tingkat suku bunga (%)
- LTQJS = Total penerimaan produksi sektor Jasa tahun lalu (Rp/th)
- LTQSP = Total penerimaan produksi sektor pertanian tahun lalu (Rp/th)
- LTQTBG = Total penerimaan produksi sektor Pertambangan tahun lalu (Rp/th)
- LTQWS = Total penerimaan produksi sektor Pariwisata tahun lalu (Rp/th)
- TQTBG = Total penerimaan produksi (PDRB) sektor Pertambangan (Rp/th)
- TQWS = Total penerimaan produksi (PDRB) sektor Pariwisata (Rp/th)
- TQNP = Total penerimaan produksi (PDRB) non pertanian lainnya
- TQJS = Total penerimaan produksi (PDRB) sektor Jasa (Rp/th)
- TQHT = Total penerimaan produksi (PDRB) sektor kehutanan (Rp/th)
- TKSP = Jumlah tenaga kerja sektor pertanian (orang/th)
- TKIN = Tenaga kerja sektor industri (orang/th)
- TKTBG = Tenaga kerja sektor pertambangan (orang/th)
- TKWS = Tenaga kerja sektor pariwisata (orang/th)
- TKJS = Tenaga kerja sektor jasa (orang/th)

Blok Permintaan Agregat (AD)

Konsumsi

Konsumsi Pangan

$CPN = t_0 + t_1YD + t_2LCPN + \mu_{19}$ (26)
 (+) (+)

Konsumsi Non Pangan

$CNPN = u_0 + u_1YD + u_2CPN + u_3TREND + \mu_{20}$ (27)
 (+) (-) (+)

Total Konsumsi
 $CONS = CPN + CNPN$ (28)

Investasi
 Total Investasi
 $INVE = v_0 + v_1IR + v_2ER + v_3D + v_4TREND + v_5LINVE + \mu_{21}$ (29)

(-) (-) (+) (+) (+)

Ekspor Daerah
 $XDRH = w_0 + w_1ER + w_2PDRBS + w_3INVE + w_4LXDRH + \mu_{22}$ (30)

(+)

Impor Daerah
 $MDRH = x_0 + x_1ER + x_2INVE + x_3PDRBK + x_4LMDRH + \mu_{23}$ (31)

(-) (-) (+) (+)

Produk domestik Regional Bruto Permintaan
 $PDRBD = CONS + INVE + GRTN + GPSP + GIND + XDRH - MDRH$ (32)

Keterangan :

- CPN = Konsumsi Pangan (Rp/th)
- CNPN = Konsumsi non pangan (Rp/th)
- CONS = Total konsumsi (Rp/th)
- ER = Nilai tukar rupiah terhadap \$ US (Rp/\$)
- IR = Tingkat suku bunga domestik (%)
- INVE = Total investasi di daerah (Rp/th)
- PABH = Pendapatan asli daerah dari bagi hasil (Rp/th)
- PDRBD = Produk Domestik Regional Bruto Permintaan
- PDRBK = Pendapatan per kapita (Rp/th)
- MDRH = Impor daerah (Rp/th)
- XDRH = Ekspor daerah (Rp/th)
- YD = Pendapatan disposibel / yang siap dibelanjakan

Blok Kinerja Perekonomian Daerah dan Makroekonomi Pertanian

Pendapatan Perkapita
 $PDRBK = (PDRBD / POPP)$ (33)

Pendapatan Disposibel
 $YD = PDRBD - TXD$ (34)

Penduduk Miskin Daerah
 $PMD = y_0 + y_1PDRBK + y_2UND + y_3GRWT + y_4D + y_5TREND + \mu_{24}$ (35)

(-) (+) (-) (-) (-)

Pengangguran Daerah
 $UND = z_0 + z_1PDRBK + z_2GRWT + z_3D + z_4TREND + \mu_{25}$ (36)

(-) (-) (-) (-)

Pertumbuhan Ekonomi Daerah
 $GRWT = (PDRBD - LPDRBD) / LPDRBD$ (37)

Keterangan:

- PDRBK = Pendapatan perkapita
- PMD = Penduduk miskin daerah
- GRWT = Pertumbuhan ekonomi Daerah (%)

Blok Kinerja Sektor Pertanian

Produksi Tanaman Pangan

$$QPN = aa_0 + aa_1PDRBK + aa_2D + aa_3TREND + \mu_{26} \dots\dots\dots (38)$$

(+) (+) (+)

Produksi Perkebunan

$$QBUN = bb_0 + bb_1TKSP + bb_2D + bb_3TREND + \mu_{27} \dots\dots\dots (39)$$

(+) (+) (+)

Produksi Peternakan

$$QPT = cc_0 + cc_1PDRBK + cc_2D + \mu_{28} \dots\dots\dots (40)$$

(+) (+)

Produksi Perikanan

$$QIKN = dd_0 + dd_1PDRBK + dd_2D + \mu_{29} \dots\dots\dots (41)$$

(+) (+)

Total Produksi Sektor Pertanian

$$TQSP = QPN + QBUN + QPT + QIKN \dots\dots\dots (42)$$

Keterangan:

- QPN = Produksi pangan (Rp/th)
 QBU = Produksi perkebunan (Rp/th)
 QPT = Produksi peternakan (Rp/th)
 QIKN = Produksi perikanan (Rp/th)
 TQSP = Total produksi sektor pertanian (Rp/th)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan merupakan penelitian yang bersifat non survei yang tidak memiliki populasi dan sampel. Instrumen yang digunakan untuk dapat menangkap fenomena makroekonomi adalah data *time series* tahunan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 1990-2011. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2013.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri data pada dokumen yang relevan pada instansi pemerintah. Semua data yang tercantum pada model penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik, kecuali data yang terkait dengan moneter yaitu tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah diperoleh dari Bank Indonesia.

Definisi Operasional Variabel Fiskal Daerah

Variabel fiskal daerah dalam penelitian ini mencakup penerimaan dan pengeluaran fiskal daerah yang diperoleh dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dinyatakan dalam satuan rupiah.

Produksi dan Tenaga Kerja

Variabel produksi adalah variabel produksi pada sektor industri, pertambangan, pariwisata, jasa dan kehutanan. Produksi ini dinyatakan dalam harga pasar yaitu dalam satuan rupiah. Variabel tenaga kerja meliputi jumlah orang yang bekerja pada sektor pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, dan jasa, dan dinyatakan dalam satuan orang.

Permintaan Agregat

Variabel permintaan agregat mencakup konsumsi, investasi dan ekspor bersih (ekspor dikurang impor). Nilai ini diperoleh dari produk domestik regional bruto berdasarkan penggunaan, dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

Kinerja Perekonomian Daerah dan Makroekonomi Pertanian

Kinerja perekonomian daerah mencakup kondisi makroekonomi yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang masing-masing dinyatakan dalam persen dan rupiah. Kinerja

makroekonomi pertanian meliputi besarnya penduduk miskin dan jumlah orang yang menganggur, dinyatakan dalam satuan orang.

Kinerja Sektor Pertanian

Kinerja sektor pertanian mencakup produksi pada sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, dinyatakan dalam harga pasar yaitu rupiah.

Teknik Analisis Data

Identifikasi dan Metoda Pendugaan Model

Identifikasi terhadap model yang dibangun merupakan prasyarat sebelum melakukan estimasi yang tepat terhadap model. Cara yang sering dilakukan dalam mengidentifikasi model adalah melalui pengujian model struktur meliputi pengujian terhadap persamaan dengan pengelompokan terlebih dahulu persamaan ke dalam jumlah total persamaan (total variabel endogen) yang selanjutnya disebut *G*, jumlah variabel dalam model (variabel endogen dan *predetermined*) atau *K*, dan jumlah variabel dalam persamaan yang diidentifikasi (endogen dan eksogen) atau disebut *M*. Notasi tersebut diformulasi sebagai berikut: $(K-M) \geq (G-1)$

Berdasarkan formulasi di atas, maka dalam suatu persamaan dalam model dapat menunjukkan kondisi: (1) Jika $(K-M) < (G-1)$, persamaan disebut *under identified*. (2) Jika $(K-M) = (G-1)$, persamaan disebut *just identified*. (3) Jika $(K-M) > (G-1)$, persamaan disebut *over identified*

Keterangan:

G = jumlah persamaan yang ada dalam sistem persamaan simultan (jumlah variabel *endogenous*)

K = jumlah total variabel yang terdapat dalam model yang sedang diteliti (variabel *endogenous* dan *predetermined*)

M = jumlah variabel *endogenous* dan *eksogenous* yang dimasukkan dalam setiap suatu persamaan dalam sistem persamaan simultan

Berdasarkan kriteria di atas maka semua persamaan adalah *over identified* sehingga dapat diestimasi dengan menggunakan metode pendugaan 2SLS (*two stage least square*). Dalam penelitian ini, estimasi model menggunakan bantuan *software* komputer Program SAS 9.1

Validasi Model

Validasi model dimaksudkan untuk menilai apakah nilai-nilai ramalan dari variabel endogen yang diestimasi memiliki perbedaan dengan nilai aktualnya. Validasi model dilakukan melalui simulasi dinamik dengan menggunakan metode *Gauss-Seidel*. Dalam validasi ini terdapat ukuran-ukuran tertentu, yaitu meliputi *Root mean square Error* (RMSE), *Root Mean Square Percentage Error* (RMSPE), *simultan bias* (UM) dan *Coefficient Theils* (U), dengan formula sebagai berikut:

$$\text{RMSE} = [1/T \sum (Y_t^s - Y_t^a)^2]^{0,5}$$

$$\text{RMSPE} = [1/T \sum \{ (Y_t^s - Y_t^a)/Y_t^a \}^2]^{0,5}$$

$$U\text{-Theil} = \frac{[1/T \sum \{Y_t^s - Y_t^a\}^2]^{0,5}}{[1/T \sum \{Y_t^s - Y_t^a / Y_t^a\}^2]^{0,5}}$$

Keterangan:

T = Jumlah periode (tahun) pengamatan

Y_t^s = Nilai estimasi pengamatan pada periode ke-*t*

Y_t^a = Nilai pengamatan aktual pada periode ke-*t*

Statistik RMSPE digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai variabel endogen hasil pendugaan menyimpang dari alur nilai aktualnya dalam ukuran persen, sedangkan nilai *U* berguna untuk mengetahui kemampuan model untuk analisis simulasi peramalan.

Jika RMSPE dan RMSE semakin kecil, maka model yang digunakan akan semakin baik, sedangkan nilai *U* berkisar anatar 0 dan 1; jika $U=0$, model yang dibangun adalah model sempurna, dan sebaliknya jika $U=1$, maka model yang dibangun adalah tidak sempurna atau naif.

Simulasi

Simulasi model dilakukan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap peubah endogen yang ingin diteliti. Setelah model divalidasi dan memenuhi kriteria secara statistika, maka model tersebut dapat dijadikan sebagai model dasar simulasi. Proses simulasi adalah proses penentuan taksiran nilai-nilai *dependent variabels* (*endogenous variables*) dengan cara mensubstitusikan hasil penaksiran koefisien regresi variabel bebas dan nilai variabel bebas yang aktual (menurut observasi) ke dalam model regresi yang berkaitan dengan *dependent variables* ini. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, dibuat skenario dengan mengasumsikan kenaikan variabel kebijakan fiskal sebesar 20 persen.

- Skenario I : Dampak peningkatan bagi hasil pajak sebesar 20 persen
- Skenario II : Dampak peningkatan bagi hasil bukan pajak sebesar 20 persen
- Skenario III : Dampak peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 20 persen
- Skenario IV : Dampak peningkatan dana alokasi umum sebesar 20 persen
- Skenario V : Dampak peningkatan pengeluaran pembangunan sektor pertanian sebesar 20 persen
- Skenario VI : Dampak peningkatan bagi hasil pajak sebesar 20 persen, bagi hasil bukan pajak sebesar 20 persen, pendapatan asli daerah sebesar 20 persen, dana alokasi umum sebesar 20 persen dan pengeluaran pembangunan sektor pertanian sebesar sebesar 20 persen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi Model

Hasil estimasi model tidak disajikan mengingat hasil dari estimasi tersebut

bukan tujuan penelitian. Untuk menjawab tujuan penelitian dianalisis dari hasil simulasi model, dengan menggunakan enam skenario simulasi.

Hasil Validasi Model

Kriteria yang digunakan dalam validasi model adalah *Root Mean Square Error* (RMSE), *Root Mean Square Percent Error* (RMSPE) dan *Theil Inequality Coefficients* pada Tabel 1. Berdasarkan hasil validasi selama 22 tahun diperoleh nilai RMSPE sebagian besar lebih kecil dari 50 persen. Secara keseluruhan, nilai *U Theil* dibawah 0.2 dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model cukup valid untuk simulasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Perekonomian Daerah dan Kinerja Makroekonomi Pertanian

Rentang simulasi historis tahun 1990-2011, bertujuan untuk mengevaluasi dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian daerah dan kinerja makro ekonomi pertanian. Kinerja perekonomian daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), total penerimaan daerah, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, dan sektor jasa, sedangkan indikator kinerja makroekonomi pertanian yaitu jumlah penduduk miskin dan pengangguran daerah. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran merupakan masalah pertanian karena kemiskinan dan pengangguran adalah lebih pada masalah pedesaan.

Hal itu disebabkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran sebagian besar berada di pedesaan, dan perekonomian Sulawesi Tenggara sebagian besar ditopang dari sektor pertanian dimana sebagian besar orang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian tersebut.

Tabel 1
Hasil Validasi Model Menurut RMS Error, RMSPE dan UTheil

Peubah	RMSE	RMSPE	U Theil
Pajak Daerah (TXD)	58819.5	950.5	0.3624
Penerimaan Retribusi Daerah (RETD)	16116.1	156.6	0.9138
Dana Alokasi Umum (DAU)	100051	52.0235	0.1768
Dana Alokasi Khusus (DAK)	15601.6	0.0	0.5325
Bagi Hasil Pajak (BHDX)	5650.9	172.0	0.1134
Bagi Hasil Bukan Pajak (BHNTX)	4240.9	0.0	0.1797
Pengeluaran Rutin Daerah (GRTN)	97476.9	144.9	0.1907
Pengeluaran Pembangunan Sektor Pertanian (GPSP)	2106.9	43.3644	0.1186
Pengeluaran Pembangunan Sektor Industri (GIND)	154.6	44.0678	0.0842
Total Produksi Sektor Industri (TQIN)	17716.0	13.0784	0.0543
Total Produksi Sektor Pertambangan (TQTBG)	9808.7	12.6209	0.0562
Total Produksi Sektor Pariwisata (TQWS)	23859.3	9.3350	0.0398
Total Produksi Sektor Jasa (TQJS)	46282.2	13.5232	0.0727
Total Produksi Sektor Kehutanan (TQHT)	2674.0	13.0018	0.0565
Tenaga Kerja Sektor Pertanian (TKSP)	38064.2	8.9940	0.0418
Tenaga Kerja Sektor Pertambangan (TKTBTG)	1981.8	26.7663	0.0874
Tenaga Kerja Sektor Industri (TKIN)	36047.7	96.9368	0.2970
Tenaga Kerja Sektor Pariwisata (TKWS)	18975.8	90.8181	0.1047
Tenaga Kerja Sektor Jasa (TKJS)	31233.5	3147.5	0.1771
Konsumsi Pangan (CPN)	31635.8	4.6059	0.0260
Konsumsi Non Pangan (CNPN)	153323.0	35.5305	0.1803
Total Investasi Daerah (INVE)	34118.4	6.7286	0.0228
Ekspor Daerah (XDRH)	191854.0	27.4194	0.2293
Impor Daerah (MDRH)	243631.0	58.1790	0.2087
Penduduk Miskin Daerah (PMD)	413214.0	123.2	0.8475
Produk Domestik Regional Bruto Permintaan (PDRBD)	396580.0	19.8108	0.1004
Total Penerimaan Daerah (TPD)	189308.0	80.0590	0.2094
Pendapatan Disposibel (YD)	339154.0	17.2279	0.0883
Pendapatan Perkapita (PDRBK)	0.2134	19.8108	0.1044
Total Konsumsi (CONS)	140792.0	14.0222	0.0691
Total Bagi Hasil (TBHS)	9160.8	82.1961	0.1300
Total Transfer Pemerintah (TRNF)	120221.0	59.4979	0.1841
Total Tenaga Kerja Daerah (TTKD)	50868.8	8.7023	0.0369
Pengangguran Daerah (UND)	19807.5	75.0649	0.1570
Pertumbuhan Ekonomi Daerah (GRWT)	20.9277.0	384.3	0.9463
Produk Domestik Bruto Sektoral (PDRBS)	71.2728	12676710	0.8234
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	71316.6	459.0	0.2763
Produksi Pangan (QPN)	73399.6	17.4925	0.1500
Produksi Perkebunan (QBUN)	43497.6	145.5	0.1274
Produksi Peternakan (QPT)	30287.5	26.9904	0.1889
Produksi Perikanan (QIKN)	64597.1	39.0018	0.2489

Sumber : Hasil Pengolahan Data (validasi)

Hasil simulasi dengan enam skenario secara ringkas disajikan pada Tabel 2. Peningkatan bagi hasil pajak 20% (Skenario 1) akan meningkatkan PAD 1,68% sehingga total penerimaan daerah meningkat 7,85%. Peningkatan bagi hasil pajak ternyata tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang berarti. Tenaga kerja pada sektor pertanian dan sektor industri sedikit mengalami penurunan yaitu masing-masing 0,03% dan 0,35%, sedangkan pada sektor pertambangan, sektor pariwisata dan sektor jasa terjadi peningkatan tenaga kerja

berturut-turut 0,21%, 0,01% dan 0,43%, sehingga terjadi penurunan pengangguran sebesar 0,25%. Penurunan pengangguran yang relatif kecil menunjukkan situasi di pasar tenaga kerja sektoral yang tidak mengalami perubahan yang berarti. Efek positif dari peningkatan bagi hasil pajak sebesar 20% terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat 1,43% disertai peningkatan pendapatan per kapita 0,27% dimana penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 11,63%.

Tabel 2
Ringkasan Hasil Simulasi (Skenario Kebijakan)

Peubah Endogen	Skenario					
	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Persentase Perubahan						
Kinerja Perekonomian Daerah:						
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.68	1.09	-	14.20	0.39	-
Total Penerimaan Daerah (TPD)	7.85	5.17	83.00	67.23	0.19	109.83
Pendapatan Perkapita (PDRBK)	0.27	0.18	2.81	2.28	0.07	3.79
Pertumbuhan Ekonomi Daerah (GRWT)	1.43	1.00	15.60	12.78	0.39	21.16
Tenaga Kerja Sektor Pertanian (TKSP)	-0.05	-0.03	-0.47	-0.38	-0.01	-0.63
Tenaga Kerja Sektor Pertambangan (TKTBG)	0.21	0.13	2.16	1.74	0.05	2.90
Tenaga Kerja Sektor Industri (TKIN)	-0.54	-0.35	-5.65	-4.56	-0.13	-7.58
Tenaga Kerja Sektor Pariwisata (TKWS)	0.01	0.00	0.07	0.06	0.00	0.09
Tenaga Kerja Sektor Jasa (TKJS)	0.43	312.07	4.48	3.62	0.10	6.01
Kinerja Makroekonomi Pertanian:						
Penduduk Miskin Daerah (PMD)	-11.63	-7.94	-55.60	-50,55	-2.98	-62.87
Pengangguran Daerah (UND)	-0.25	-0.16	-2.62	-2.11	-0.05	-3.51

Sumber : Hasil Pengolahan Data (simulasi)

Keterangan:

- S1 : Dampak Peningkatan Bagi Hasil Pajak Sebesar 20 Persen
- S2 : Dampak Peningkatan Bagi Hasil Bukan Pajak 20 Persen
- S3 : Dampak Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sebesar 20 Persen Peningkatan
- S4 : Dampak Peningkatan Dana Alokasi Umum Sebesar 20 Persen
- S5 : Dampak Peningkatan Pengeluaran Pembangunan Sektor Pertanian Sebesar 20 Persen
- S6 : Dampak Peningkatan Bagi Hasil Pajak Sebesar 20 Persen, Bagi Hasil Bukan Pajak Sebesar 20 Persen, Pendapatan Asli Daerah Sebesar 20 Persen, Dana Alokasi Umum Sebesar 20 Persen dan Pengeluaran Pembangunan Sektor Pertanian Sebesar 20 Persen

Pada skenario 2 yaitu peningkatan bagi hasil bukan pajak 20% dapat meningkatkan PAD 1,09% sehingga total penerimaan daerah meningkat 5,17%. Peningkatan bagi hasil bukan pajak ini memberikan efek yang berarti pada sektor jasa dimana terjadi peningkatan tenaga kerja sebesar 312%, sementara sektor lainnya relatif tidak mengalami perubahan yang berarti. Peningkatan yang tinggi ini mengingat penduduk yang bekerja pada sektor jasa relatif kecil dibandingkan pada sektor lainnya. Secara keseluruhan terjadi penurunan pengangguran walau relatif kecil yaitu 0,16%. Namun, penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 16,91%, dimana pendapatan per kapita meningkat 0,18%.

Pada skenario 3, peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 20% maka akan dapat meningkatkan total penerimaan daerah 83%. Peningkatan PAD ini tampaknya memberikan *multiplier effect* yang besar dalam kegiatan perekonomian sehingga dapat meningkatkan total penerimaan daerah yang besar. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 15,6% dan pendapatan per kapita 2,61% sehingga dapat menurunkan pengangguran dan kemiskinan masing-masing 2,62% dan 55,6%.

Skenario 4, peningkatan dana alokasi umum sebesar 20% akan meningkatkan total penerimaan daerah 67,23% dan berimbas pada peningkatan PAD 14,2%. Peningkatan DAU ini dapat memacu perekonomian ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat 12,78%. Kondisi ini membuat pendapatan per kapita meningkat 2,28% yang disertai penurunan pengangguran 2,11% dan angka kemiskinan sebesar 50,55%. Penurunan angka kemiskinan tersebut sebagai indikasi bahwa pemerintah seyogyanya memberikan perhatian yang besar agar DAU yang dikucurkan dari pusat dapat meningkat secara signifikan agar dapat memberikan andil besar dalam pengurangan kemiskinan.

Skenario 5, peningkatan pengeluaran pembangunan sektor pertanian sebesar 20%

tampaknya kurang memberikan peran berarti dalam perekonomian. Peningkatan pengeluaran tersebut akan meningkatkan PAD hanya 0,39% dan total penerimaan daerah 0,19%. Tenaga kerja sektoral relatif tidak mengalami perubahan berarti sehingga angka pengangguran menurun relatif kecil yaitu 0,05%, dimana penduduk miskin menurun 2,98%. Pertumbuhan ekonomi meningkat 0,39% diiringi pendapatan per kapita yang meningkat 0,07%. Peningkatan pengeluaran pembangunan sektor pertanian sebesar 15% yang kurang memberikan efek yang berarti pada peningkatan PAD dan penurunan pengangguran serta kemiskinan mengindikasikan bahwa selama ini alokasi dana pada sektor pertanian tidaklah memadai dibandingkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Sultra yang sangat besar dimana mencapai 35% dari total PDRB.

Skenario 6, peningkatan bagi hasil pajak sebesar 20 persen, bagi hasil bukan pajak sebesar 20 persen, pendapatan asli daerah sebesar 20 persen, dana alokasi umum sebesar 20 persen dan pengeluaran pembangunan sektor pertanian sebesar 20 persen memberikan efek yang sangat baik bagi perekonomian daerah. Hal itu tampak pada peningkatan total penerimaan daerah yang mencapai 109% dan pertumbuhan ekonomi 21% serta pendapatan per kapita 3,79%. Tenaga kerja sektor jasa dan sektor pertambangan mengalami peningkatan masing-masing 6,01% dan 2,90%. Pengangguran mengalami penurunan sebesar 3,51% diiringi pengurangan penduduk miskin yang signifikan 62,87%.

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dan dengan merujuk tujuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan bagi hasil pajak 20% akan meningkatkan PAD 1,68%, terjadi penurunan pengangguran sebesar 0,25%, dan penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 11,63%. Pe-

ningkatan bagi hasil bukan pajak 20% dapat meningkatkan PAD 1,09%, penurunan pengangguran dan penduduk miskin masing-masing 0,16% dan 16,91%. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 20% akan meningkatkan total penerimaan daerah 83%, menurunkan pengangguran dan kemiskinan masing-masing 2,62% dan 55,6%. Peningkatan dana alokasi Umum Sebesar 20% akan meningkatkan PAD 14,2%, penurunan pengangguran 2,11% dan angka kemiskinan sebesar 50,55%. Peningkatan pengeluaran pembangunan sektor pertanian sebesar 20% tampaknya kurang memberikan peran berarti dalam perekonomian. Peningkatan pengeluaran tersebut akan meningkatkan PAD hanya 0,39%, angka pengangguran menurun relatif kecil yaitu 0,05%, dimana penduduk miskin menurun 2,98%. Peningkatan bagi hasil pajak sebesar 40 persen, bagi hasil bukan pajak sebesar 20 persen, pendapatan asli daerah sebesar 15 persen, dana alokasi umum sebesar 20 persen dan pengeluaran pembangunan sektor pertanian sebesar 20 persen memberikan efek yang sangat baik bagi perekonomian daerah. Pengangguran mengalami penurunan sebesar 3,48% diiringi pengurangan penduduk miskin yang signifikan 62,73%.

Saran

Kebijakan berorientasi output pada satu sisi dan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk pada sisi lain merupakan langkah yang perlu diambil agar pendapatan per kapita dapat meningkat. Peningkatan pendapatan per kapita ini akan berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan pendapatan per kapita akan lebih besar pengaruhnya di dalam menurunkan angka kemiskinan dibandingkan angka pengangguran. Pemerintah seyogyanya memberikan perhatian yang besar agar DAU yang dikucurkan dari pusat dapat meningkat secara signifikan agar dapat memberikan andil besar dalam pengurangan kemiskinan. Peningkatan pengeluaran pembangunan sektor pertanian sebesar 20% yang

kurang memberikan efek yang berarti pada peningkatan PAD dan penurunan pengangguran serta kemiskinan mengindikasikan bahwa selama ini alokasi dana pada sektor pertanian tidaklah memadai dibandingkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Sultra yang sangat besar dimana mencapai 35% dari total PDRB. Oleh karena itu, alokasi pada sektor pertanian perlu mendapat penekanan agar nilai tambah yang tercipta dari sektor tersebut dapat diciptakan di daerah Sultra.

Skenario kebijakan yang seyogyanya ditempuh oleh PEMDA agar berupaya sedemikian rupa untuk dapat meningkatkan PAD dan kucuran DAU dari pusat secara signifikan. Jika hal ini dapat dilakukan akan mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita dan sangat membantu untuk menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan DAU yang signifikan dapat menstimulus peningkatan PAD.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian memberikan manfaat buat pengambil kebijakan di daerah utamanya dalam menekankan orientasi pembangunan yang perlu ditempuh. Namun demikian, mengingat penelitian ini adalah bersifat makro dimana variabel yang digunakan adalah variabel makroekonomi yang bersifat agregat, maka konsekuensinya adalah rekomendasi model yang dihasilkan berupa kebijakan makro, sehingga masih perlu langkah operasional untuk mewujudkannya. Langkah operasional tersebut tidak masuk dalam lingkup penelitian karena hal tersebut akan tercakup pada kajian yang bersifat mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Abustan dan Mahyudin. 2009. Analisis Vector Auto Regressive (VAR) Terhadap Korelasi Antara Belanja Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan, Tahun 1985-2005. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10(1): 1-14.

- Akanni, K. A., and O. H. Osinowo. 2013. Effect Fiscal Instability on Economic Growth in Nigeria. *Advances in Economic and Business* 1(2): 124-133.
- Eze, O. R. and F. O. Ogiji. 2013. Impact of Fiscal Policy on The Manufacturing Sector Output in Nigeria: An Error Correction Analysis. *International Journal of Business and Management Review* 1(3): 35-55.
- Haderi, S., T. Kola and E. Liko. 2010. A Critical Assessment of Fiscal Policy and Impact on Economic Growth Albanian and Transition Economic Case. *Euro Economica* 3(26): 7-16.
- Hadi, Y. S. 2003. Analisis Vector Auto Regression (VAR) Terhadap Korelasi Antara Pendapatan Nasional dan Investasi Pemerintah di Indonesia, 1983/1984 – 1999/2000. *Jurnal Keuangan dan Moneter* 6(2): 107-121.
- Iskandar, I. 2010. Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, IPM dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provisnsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 2(2): 143-158.
- Maisaroh, S. 2008. Pengembangan Produksi Kerajinan Sebagai Upaya Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* 1(1): 70-82.
- Manurung, J. J., A. H Manurung, dan F. D. Saragih, 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Musa, Y., B. K. Asare and S. U. Gulumbe. 2013. Effect Monetary-Fiscal Policies Interaction on Price and Output Growth in Nigeria. *Journal of Applied Statistics*, 4(1): 55-74.
- Ningsih, M. P dan H. Prih. 2012. Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 4(1): 133-140.
- Pakasi, C. B. D. 2004. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Disertasi* Doktor Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Santoso, P. B, dan P. Rahayu. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan* 2(1): 9-18.
- Sasana, H. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10(1): 103-124.
- Sebayang, L. K. 2008. Keterkaitan Desentralisasi Fiskal Sebagai Political Process Dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* 1(1): 63-69.
- Setiyawati, A dan A. Hamzah. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAK, DAU, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akutansi dan Keuangan Indonesia* 4(2): 221-228.
- Sinaga, B.M. dan H. Siregar. 2003. *Laporan Akhir: Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sriyana, J. 2009. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal UNISIA* 32(72): 209-227.
- Sudaryanto, T dan I. W. Rusastra. 2006. Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Litbang Pertanian* 25(4): 115-122.
- Sudjai, M. 2011. Dampak Kebijakan Fiskal Dalam Upaya Stabilitas Harga Komoditas Pertanian. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 9(4): 297-312.
- Tamai, T. 2009. Employment, Fiscal Policy and Oligopsonistic Labour Market. *Australian Journal of Labor Economics*, 12(3): 321-337.

Yudhaningsih, R. 2010. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Regional di Indonesia. *Jurnal TEKNIS* 5(1): 46-52.

Yudhoyono, S. B. 2004. *Kebijakan Fiskal Indonesia*. Brighten Press. Bogor.